

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anggara,Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka setia.
- Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Afabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cipi Safruddin. 2004 *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, N. William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Askara.
- Farida, Yusuf 2008 *Evaluasi Program Dan Instrument Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Ciptah
- Moleong, Lexy.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Hrbani. 2013. *Teori Administrasi Publuk*. Banadung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*, yogjakarta :
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (teori proses dan studi kasus)*. Yogyakarta : CAPS
- Winarno, Budi. 2014 : *Kebijakan Publik : Edisi Refisi Terbaru* . Yogyakarta: PT Buku Seru.

JURNAL

- Muhammad zeanuddin. 2012. *Kebijakan Free Trade Zone Batam-Bintan-Karimun (Permasalahan Implementasi Dan Solusinya)*. *Eko Ragional*, vol. 7 no 2.
- Yenny Lay Rade. 2015. *Evaluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam*. Vol, 4, No 2
- Sri Putri Andini, Imam Yudhi Prasatya, Dian Prima Safitri. 2018 *Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang Dalam Kerangka Ekonomi Politik Kelembagaan Jurnal Imu Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2.

Raja Hardiansyah. 2016. Analisis Implementasi Kebijakan Pulau Bintan Sebagai Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Investasi Di Bintan. Vol. 5, No, 2.

Muhammad Zaenuddin, Dkk. 2017. Praktek Otonomi Daerah Di Batam : Dinamika Dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ). Seminar Nasional Cendikia Ke 3, ISSN (P) : 2460 8696, ISSN (E) : 2540-7589.

Khairul Anwar, Nofri Yanti. 2014. Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Batam. Jom Fisip, Vol. 1 No, 2.

Dokumen Atau Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perddagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Perauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.